

Research Paper

Good Corporate Governance Principles in Indonesian Syariah Banking

Andrew Shandy Utama¹

¹ Program of Law Study, Faculty of Law, Universitas Lancang Kuning, Indonesia.

Article History

Received:
06.01.2020

Revised:
09.02.2020

Accepted:
23.03.2020

***Corresponding Author:**
Andrew Shandy Utama
Email:
andrew.fh.unilak@gmail.com

Good Corporate Governance Principles in Indonesian Syariah Banking

Abstract Islamic banks are banks that carry out their business activities based on the principles of Islamic law in banking activities based on fatwas issued by the National Sharia Council of the Majelis Ulama Indonesia. This research aims to explain the principles of Good Corporate Governance in Islamic banking in Indonesia. The method used in this research is normative legal research. The results of the research explained that to maintain the trust of Indonesian people who are predominantly Muslim, Islamic banking must apply the principle of Good Corporate Governance in its management. The application of the principle of Good Corporate Governance in Islamic banking is strictly regulated in Article 34 Paragraph (1) of Law Number 21 of 2008, which emphasizes that Islamic banks must implement good governance that includes the principles of transparency, accountability, responsibility, professionalism and fairness in carrying out its business activities. Form of application of the principles of Good Corporate Governance in Islamic banking is supervision conducted by the National Sharia Council of the Majelis Ulama Indonesia in general and the Sharia Supervisory Board specifically in each Islamic bank. Based on data from the Financial Services Authority in 2017, currently there are 13 Islamic banks in Indonesia, 13 Islamic business unit of conventional banks, and 102 Islamic rural banks. This is evidence of the existence and development of Islamic banking that is significant in the national banking system.

Keyword: Law, Islamic Banking, Good Corporate Governance.



1. Pendahuluan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya (Kasmir, 2012). Menurut kegiatan usahanya, jenis-jenis bank dapat dibedakan atas bank konvensional dan bank syariah (Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012). Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Andrew Shandy Utama, 2018).

Undang-Undang tentang Perbankan mengamanatkan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap bank wajib menjaga tingkat kesehatannya dan menjaga kepercayaan masyarakat yang menitipkan dananya di bank. Akan tetapi, masyarakat Indonesia pernah kehilangan kepercayaan terhadap dunia perbankan pada saat terjadinya krisis ekonomi tahun 1998. Krisis ekonomi tersebut menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional. Bukti nyata yang diakibatkannya antara lain yaitu dengan dibekukannya usaha 38 bank, antara lain Bank Ciputra, Bank Ganesha, Bank Pesona, Bank Alfa, Bank Aspac, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada 7 bank yang di-take over oleh pemerintah, yaitu Bank RSI, Bank Putera Sukapura, Bank POS, Bank Artha Pratama, Bank Nusa Nasional, Bank Jaya, dan Bank IFI. Selain itu, juga ada 4 bank pemerintah, yaitu Bank Dagang, Bank Exim, Bank Bumi Daya, dan Bapindo yang di-merger menjadi Bank Mandiri (Andrew Shandy Utama, 2018). Akan tetapi, ternyata bank syariah tidak terkena dampak dari krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998. Pada saat krisis ekonomi berlangsung, secara faktual Bank Muamalat Indonesia yang merupakan satu-satunya bank umum syariah yang ada di Indonesia dikategorikan sebagai bank yang sehat (Abdul Ghofur Anshori, 2009).

Dari pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah prinsip Good Corporate Governance pada perbankan syariah di Indonesia?

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Andrew Shandy Utama, 2018). Sejarah perbankan syariah pertama kali adalah pendirian sebuah bank Islam di Mesir, yaitu didirikannya Islamic Rural Bank di Kairo pada tahun 1963. Bank Islam pertama yang dimiliki oleh pihak swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan pada tahun 1975 oleh sekelompok pengusaha muslim yang berasal dari berbagai negara (Abdul Ghofur Anshori, 2009). Sudah cukup lama umat Islam, termasuk di Indonesia, mengalami berbagai kendala dalam pengembangan potensi dan pembangunan ekonominya. Salah satu penyebabnya adalah penyakit dualisme antara ekonomi dan syariah yang cukup kronis. Dualisme ini muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan umat untuk menggabungkan dua disiplin ilmu, ekonomi dan syariah, yang seharusnya saling mengisi dan menyempurnakan (Muhammad Syafi'i Antonio, 2002).

Prakarsa mengenai pendirian bank syariah di Indonesia mulai dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan 'Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan' di Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada

Musyawarah Nasional ke-IV Majelis Ulama Indonesia di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990 untuk membentuk tim kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Hasil kerja tim tersebut adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991, yang resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 (Rachmadi Usman, 2012). Perkembangan awal perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional direspon dengan cepat oleh pemerintah. Pada tanggal 25 Maret 1992, disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan guna mengakomodir berdirinya bank syariah di Indonesia (Andrew Shandy Utama, 2018).

Pada Pasal 6 Huruf m dan Pasal 13 Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat salah satunya adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ketentuan ini lalu diperkuat dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai syari'at dalam menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank, menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, dan menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 semakin menguatkan regulasi mengenai perbankan syariah di Indonesia. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan secara jelas bahwa bank umum maupun bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah. Pada pasal tersebut juga dijelaskan pengertian mengenai prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), serta pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pada tahun 1998, selain menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional, krisis ekonomi yang terjadi juga menjadi titik tolak perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan bank syariah tidak terkena dampak dari krisis ekonomi tersebut. Beberapa bank konvensional, baik bank milik pemerintah maupun swasta, yang mengembangkan usahanya dengan mendirikan bank syariah, seperti Bank Syariah Mandiri yang didirikan tahun 1999, Bank Permata Syariah yang didirikan tahun 2002, Bank Mega Syariah yang didirikan tahun 2004, Bank Rakyat Indonesia Syariah yang didirikan tahun 2008, Bank Syariah Bukopin yang didirikan tahun 2008, dan lain sebagainya (Andrew Shandy Utama, 2018). Merespon perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional, maka pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum tersendiri bagi bank syariah di Indonesia.

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 secara filosofi yuridis telah memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum pencari keadilan, terutama menyangkut transaksi bisnis ekonomi syariah (M. Ali Mansyur, 2011).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah berlangsung pesat dan cepat. Salah satu periode yang unik dan menarik dari rangkaian panjang perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah periode pematangan konsep dan rintisan awal yang berlangsung pada dekade 90-an. Pada saat itu masih ada satu bank umum syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Dengan statusnya sebagai bank umum syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia menjadi pilot project dan trademark kebangkitan serta implementasi besar-besaran pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia. Dekade dimana Bank Muamalat Indonesia berdiri menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Periode ini sangat strategis karena menjadi batu loncatan keberhasilan atau kegagalan perbankan syariah pada era

selanjutnya. Hamparan panjang dinamika perbankan syariah di Indonesia tidak bisa lepas dari eksistensi Bank Muamalat Indonesia (Mohamad Nur Yasin, 2010).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017, saat ini bank umum syariah di Indonesia berjumlah 13 bank, unit usaha syariah dari bank konvensional berjumlah 21 bank, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berjumlah 102 bank. Inilah bukti eksistensi dan perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional. Artinya, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dapat berkembang dengan pesat atas dasar kepercayaan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Berbeda dengan bank konvensional, selain memiliki tanggung jawab hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, bank syariah memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan tanggung jawab ibadah kepada Allah. Bank syariah memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat artinya bahwa masyarakat menganggap karyawan yang bekerja di bank syariah mempunyai akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam, misalnya jujur dalam bekerja. Bank syariah memiliki tanggung jawab ibadah kepada Allah artinya bahwa bank syariah secara tidak langsung telah berdakwah menjalankan syari'at Islam di bidang muamalah, misalnya menganjurkan masyarakat untuk meninggalkan riba.

Untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka perbankan syariah wajib menerapkan prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaannya. Penerapan prinsip Good Corporate Governance sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi sektor perbankan untuk berkembang dengan baik. Oleh karena itu, Bank for International Settlement sebagai lembaga yang mengkaji mengenai prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan Good Corporate Governance bagi sektor perbankan secara internasional (Andrew Shandy Utama, 2018).

Dalam prinsip keterbukaan, pertama bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Kedua, informasi yang harus diungkapkan meliputi, tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, cross shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan penerapan prinsip Good Corporate Governance, serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank. Ketiga, prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Terakhir, kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

Dalam prinsip akuntabilitas, pertama bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Kedua, bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance. Ketiga, bank harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan bank. Terakhir, bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha, dan strategi bank, serta memiliki rewards and punishment system.

Dalam prinsip tanggung jawab, pertama untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. Kedua, bank harus bertindak sebagai good corporate citizen, termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Dalam prinsip independensi, pertama bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder tertentu dan bebas dari benturan kepentingan. Kedua, bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

Dalam prinsip kewajaran, pertama bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Kedua, bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Sebagai lembaga kepercayaan, baik bank konvensional maupun bank syariah, dalam menjalankan kegiatan usahanya harus menerapkan prinsip keterbukaan, memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran

bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank, berpegang pada prudential banking practices dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab, objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan, serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (Andrew Shandy Utama, 2016).

Pada dasarnya, penerapan prinsip Good Corporate Governance pada bank konvensional dan bank syariah adalah sama, karena mengacu pada 'Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia' yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama, 2019).

Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada bank syariah diatur secara tegas pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bentuk penerapan prinsip Good Corporate Governance pada perbankan syariah adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara umum dan Dewan Pengawas Syariah secara khusus di masing-masing bank syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan (Abdul Ghofur Anshori, 2009).

Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi proses pengembangan produk baru bank syariah, meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk produk baru bank syariah yang belum ada fatwanya, melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, serta meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya (Abdul Ghofur Anshori, 2009).

4. Kesimpulan

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka perbankan syariah wajib menerapkan prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaannya. Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada perbankan syariah diatur secara tegas dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bentuk penerapan prinsip Good Corporate Governance pada perbankan syariah adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara umum dan Dewan Pengawas Syariah secara khusus di masing-masing bank syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017, saat ini bank umum syariah di Indonesia berjumlah 13 bank, unit usaha syariah dari bank konvensional berjumlah 21 bank, dan bank pembiayaan rakyat syariah berjumlah 102 bank. Inilah bukti eksistensi dan perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional.

Referensi

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kasmir, 2012, *Dasar-dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2012, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andrew Shandy Utama, 2016, *Perbandingan Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah*, *Jurnal Daya Saing*, Vol. 2 No. 1, 39-45.

- Andrew Shandy Utama, 2018, History and Development of Islamic Banking Regulations in the National Legal System of Indonesia, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 15 No. 1, 37-50.
- Andrew Shandy Utama, 2018, Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 2 No. 2, 100-113.
- Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama, 2019, Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Mizan*, Vol. 3 No. 2, 197-207.
- M. Ali Mansyur, 2011, Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 Ed. Khusus, 67-75.
- Mohamad Nur Yasin, 2010, Argumen-argumen Kemunculan Awal Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal De Jure*, Vol. 2 No. 1, 109-123.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2012, Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al Mawarid*, Ed. VII, 17-25.
- Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.